

BAB IV

KESIMPULAN

Republik Islam Iran adalah negara dengan historis yang panjang mulai dari Revolusi Besar 1979 hingga soal label negara fundamentalis yang didapatnya. Negeri para *mullah* dengan sistem pemerintahan khususnya yaitu *Velayet el-Faqeh* atau kepemimpinan para ulama ini satu-satunya negara yang merupakan sintesa dari ajaran Syiah Imam Dua Belas. Dari kepemimpinan dan dominasi ulama yang kuat dan luas ini kemudian membuat gejolak dan menimbulkan perlawanan didalam negeri *mullah* ini sendiri. Ulama-ulama yang ada dianggap terlalu mencampuri seluruh hal. Menjadi hal yang problematik untuk diteliti kemudian, karena eksistensi ulama yang ada adalah sintesa dari prinsip-prinsip Imamah ajaran Syiah Imam Kedua Belas, yang artinya keberadaan ulama sebagai penerus kenabian yang bertujuan untuk kemashalahatan umat tidak bisa ditentang keberadaan dan keputusannya. Melalui ini pula dapat diperjelas bahwa apapun yang dilakukan ulama harus ditaati karena keputusan dari ulama adalah keputusan perwakilan dari sang ilahi.

Kepemimpinan ulama ini tapi nyatanya tidak menjadi jaminan akan adanya keadilan pada rakyat. Ulama-ulama yang ada justru malah menimbulkan praktik hubungan yang asimetris dimasyarakat. Seperti pada penafsiran sepihak teks-teks agama terutama menyoal bagaimana kedudukan dan peran perempuan, karena dalam ajaran Syiah ulama-ulama memang mempunyai wewenang tersebut. Selain itu posisi ulama yang didominasi laki-laki menimbulkan perdebatan tersendiri, akan bagaimana bisa adilnya hukum yang ada jika dalam proses perumusan kebijakan yang ada diisi oleh kaum laki-laki yang tidak bisa mengerti keadaan dan hak perempuan. Bias gender pun dapat dilihat makin terang, mulai dari tafsir dan konstruk sepihak ulama-ulama kemudian proses pembuatan produk hukum yang bias gender, hingga akhirnya lahir kebijakan yang diskriminatif pada perempuan seperti

presiden hanya untuk kaum laki-laki, hak asuh anak, kewajiban berhijab, pernikahan dan perceraian, pernikahan anak, segregasi diranah publik, hak bekerja. Dari contoh kebijakan-kebijakan yang dijelaskan tersebut membenarkan perbedaan terhadap perempuan adalah benar terjadi. Perempuan sampai saat ini masih menjadi warganegara kelas dua, masih menjadi makhluk yang tidak diuntungkan. Negara dalam hal ini sebagai institusi politik yang bisa memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pada warganegaranya justru malah melanggengkan praktik ketimpangan yang ada.

Pada penelitian skripsi ini penulis menemukan adanya pengaruh feminisme Barat yaitu feminisme liberal didalam tubuh Iran. Feminisme liberal memandang bahwa baik laki-laki ataupun perempuan memiliki posisi sederajat. Dalam mendukung pandangan tersebut aliran feminis ini berpendapat harus dihapuskannya aturan-aturan ataupun kebijakan ataupun produk hukum yang menghambat akses perempuan untuk maju dan berperan diranah publik. Dapat dilihat dari sini bahwa paham Barat tidak selamanya buruk, ajaran feminis justru membuka tabir kebebasan dan keadilan pada kaum perempuan yang kerap disubordinasikan diberbagai macam kebudayaan dunia. Dengan ini sekaligus juga menjadi bukti bahwa sekuat apapun pemerintah membendung pengaruh paham atau nilai-nilai Barat, pada kenyataannya paham Barat tetap mendapatkan hati dan bahkan menjadi motor penggerak perubahan dimasyarakat.

Aliran feminisme liberal mendapatkan tempat dihati masyarakat Iran, ini dapat dibuktikan penulis dari adanya gerakan-gerakan kesetaraan gender yang ada. Dimana gerakan-gerakan tersebut memiliki nafas dan tujuan yang serupa dengan feminisme liberal. Diawali dari upaya penandatanganan Konvensi CEDAW dibawah kepemimpinan Khatami yang menjadikan bukti adanya keseriusan rezim untuk menangani penghapusan diskriminasi pada perempuan. Kemudian adanya dua gerakan pembebasan pada era Ahmadinejad yaitu kampanye *One Million Signature* yang

menuntut untuk penghapusan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan demonstrasi besar *Green Movement* dengan tuntutan demokratisasi, dimana perempuan memiliki peran penting sebagai garda terdepan dan menciptakan citra damai. Demonstrasi ini tersebut juga digadag-gadag menjadi demonstrasi terbesar setelah adanya demonstrasi pada 1979. Terakhir adalah adanya kampanye *My Stealthy Freedom* yang masih berjalan hingga saat ini, suatu kampanye yang menuntut aturan kewajiban hijab pada perempuan, fokus kampanye ini adalah pada kebebasan berhijab dimana penggunaan hijab disini dipandang sebagai bentuk ketulusan bukan paksaan.

Menggunakan teori *Gender Mainstreaming* sebagai kacamata dalam memandang sebuah fenomena, penulis berusaha menjelaskan riset ini. Teori ini adalah teori yang menjelaskan tentang langkah atau proses untuk menuju pada kesetaraan gender bukan menjelaskan soal hasil. Teori *Gender Mainstreaming* bermuara pada pentingnya integrasi gender yang ada di sebuah negara. Dengan teori ini bahasan mengenai kesetaraan gender menjadi hal yang penting, soal bagaimana negara menjalankan perannya dan bagaimana bahasan mengenai gender menjadi bahasan yang diutamakan. Berdasar teori tersebut gerakan-gerakan kesetaraan gender yang berusaha dijelaskan oleh peneliti memiliki peran besar terhadap perkembangan isu gender di Iran. Dimana proses *gender mainstreaming* justru dilakukan oleh gerakan yang mengusahakan agar bahasan gender menjadi suatu bahasan yang umum dan diterima di Iran. Negara gagal dalam melakukan proses *gender mainstreaming* mengingat banyaknya kepentingan dan singgungan antar aktor didalamnya terutama dari kelompok ulama fundamentalis. Dari adanya gerakan-gerakan tersebut pula juga menunjukkan mengenai *demand* yang diberikan pada rezim untuk menuju kehidupan yang lebih demokratis.

Adanya upaya yang dilakukan oleh gerakan-gerakan tersebut menjadi bukti masih adanya praktik budaya patriarki.

Feminisme sebagai sebuah paham berusaha hadir untuk menghapuskan praktik-praktik tersebut. Bahasan feminisme sendiri adalah bahasan kontemporer yang menarik untuk dikaji dalam studi Hubungan Internasional yang membuktikan bahwa studi ini bukan hanya menyoal isu *high-politics* semata. Isu emansipasi perempuan dan kesetaraan gender juga menjadi bagian dari studi ini. Hal ini dapat dibuktikan dari bahasan mengenai kesetaraan gender yang menjadi diskursus global. Bukti sudahnya kajian gender menjadi diskursus global dapat dilihat dari adanya Konvensi CEDAW, suatu konvensi yang mengandung arti penting untuk penghapusan perilaku diskriminasi pada perempuan. Tidak hanya itu, kesetaraan gender makin diperkuat dengan dirumuskannya poin ke-5 yaitu Pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dari dua penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sampai sekarang berbagai institusi atau kelompok diberbagai belahan dunia memandang kesetaraan gender menjadi suatu bahasan penting. Mengingat perempuan juga memiliki hak, perempuan juga subjek dalam hak asasi manusia, dan ikut andil dalam pembangunan bangsa juga merupakan hak seluruh warganegara.

Berdasar usaha eksplorasi pembahasan yang berusaha dijelaskan, penulis dengan ini masih mengakui adanya keterbatasan dalam penelitian skripsi ini. Keterbatasan ini karena penulis hanya menggunakan data sekunder dalam pengumpulan data, dimana tak jarang ditemui perbedaan dan kurangnya informasi yang terdapat dalam sumber bacaan yang digunakan. Adapun untuk agenda riset selanjutnya penulis mengharapkan adanya data primer. Penulis juga mendorong kepada peneliti selanjutnya agar bahasan mengenai Islam dan feminisme di Iran dapat terus dikaji. Dikatakan demikian karena sampai saat ini bahasan mengenai kehadiran feminisme di Iran yang dihadapkan dengan sistem pemerintahan *Velayat el- Faqeh* masih menjadi perdebatan yang panjang.